PERAN BADAN USAHA MILIK DESA TIRTA MANDIRI DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PONGGOK, KECAMATAN POLANHARJO, KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA TENGAH

SKRIPSI

DISUSUN OLEH :

NURHAYATI

NIM : 14510016

PROGRAM STUDI ILMU PEMBANGUNAN SOSIAL/ SOSIATRI

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2018

PERAN BADAN USAHA MILIK DESA TIRTA MANDIRI DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PONGGOK, KECAMATAN POLANHARJO, KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA TENGAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Mencapai

Derajat Kesarjanaan Jenjang Strata Satu (S1

Program Studi Pembangunan Sosial/Sosiatri

DISUSUN OLEH :

NURHAYATI

NIM : 14510016

PROGRAM STUDI ILMU PEMBANGUNAN SOSIAL/ SOSIATRI

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan gelar sarjana (S1) Progam Studi Ilmu Sosiatri pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 27 Maret 2018

Waktu : 13.30 WIB s.d. Selesai

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. **Dra. Widati, Lic.rer.reg** Ketua Penguji/Pembimbing	.....
2. **MC. Candra Rusmala D., M.Si.** Penguji Samping I	.....
3. **Dra. Oktarina Albizzia, M.Si** Penguji Samping II	.....

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Drs. AY Oelin Marliyantoro, M.Si.

PROGRAM ILMU SOSIATRI/PEMBANGUNAN SOSIAL STRATA-1

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2018

MOTTO

Ketika engkau percaya pada sesuatu

maka kau akan melihatnya

Lakukan yang terbaik, sehingga aku tak akan menyalahkan diriku sendiri atas segalanya. (Magdalena Neuner)

Satu-satunya hal yang harus kita takuti adalah ketakutan itu sendiri.

(Franklin D. Roosevelt)

Jangan pergi kemana jalan akan berujung, buat jalanmu sendiri dan tinggalkan jejak. (Ralph Waldo Emerson)

PERSEMBAHAN

UNTUK

MAMA

&

ADIK-ADIKKU

Terimakasih untuk doa yang tak pernah putus.....

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat, karunia, dan perlindungan-Nya peneliti akhirnya mampu menyelesaikan proses pengerjaan skripsi mulai dari awal sampai akhir pengerjaanya. Setelah melewati berbagai proses yang cukup rumit akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Bagi penulis menyelesaikan karya kecil ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri, mesekipun sepintas terlihat sangat jauh dari kata memuaskan, pada kesempatan ini dan di ruang yang terbatas ini pula penulis ingin sekali menyampaikan terima kasih atas semua bantuan pihakpihak yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaikan pengerjaan skripsi ini. Untuk itu penulis-pun ingin secara khusus menyampaikan terima kasih

pada:

1. Bapak Drs. Habib Muchsin, S.Sos.,M.Si, sebagai Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta

2. Bapak Drs. Oelin Marliyantoro., M.Si sebagai Ketua Prodi Ilmu Sosiatri

3. Ibu Dra. Widati, lic.rer.reg sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberi arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Ibu Dra. Oktarina Albizzia., M.Si sebagai dosen pembimbing akademik selama peneliti kuliah di STPMD “APMD” Yogyakarta

5. Seluruh Dosen pada Program Studi Ilmu Sosiatri S1 STPMD “APMD” Yogyakarta.

6. Untuk orangtua tercinta, ibu Lisna terima kasih untuk segala doa dan harapan yang kau sandarkan di bahu anakmu ini. Anda adalah perempuan hebat dengan penuh motivasi sehingga berkat perjuanganmu anakmu sampai pada hari ini.

7. Untuk Adikku tersayang, Evita, Muhammad Yusril Hendra dan Hesti Yolanda kalian merupakan api kecil yang membakar semangatku.

8. Untuk Bung Julian Maurits Astari, terimakasih dengan setia membimbing saya dari awal perkuliahan dan di organisasi. Anda adalah bagian dari inspirasi terbesar saya dan tetaplah demikian bagi semua orang yang mengenalmu.

9. Teman-teman seangkatan, senasib dan sepenanggungan Program Studi Ilmu Sosiatri angkatan 2014: Suster Ajelina Simatupang dan Miftah Arifatu Agnia

10. Buat kawan-kawan seperjuangan di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Komisariat "STPMD" APMD, Bung Uldan, Bung Irwan, Bung Ikar, Bung Tomy, Bung Jefhorison, Bung Ivan, Bung Ijal, Bung Gaspar & Gasfar, Bung Billy, Bung Ary, Bung Theo, Bung Ino, Bung Thoby, Bung Vino, Bung Yohanes, Bung Raffi, Bung Ijay, Bung Atul, Sarinah Zeny, Sarianh Eca, Sarinah Ira, Sarinah Azim, Sarinah Mega, Sarinah Jumi, Sarinah Susi, Sarinah Diana, Sarinah Febri, Sarinah Cher, Sarinah Azim kemudian teman-teman di DPC GMNI Yogyakarta dan Komisariat lain serta semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Merdekaa..!!!

11. Untuk Tony Prasetyo, terimakasih atas kesabaranmu menahan amarahku ketika diriku menemui jalan buntu. Terimakasih pula untuk doa yang selalu kau panjatkan demi kesuksesanku. Semoga Allah senantiasa mendekatkan kita. Amin.

12. Terakhir, untuk adik cantikku Rina Ardianti, terimakasih selalu bersedia menemani saya selama penelitian, menyusun skripsi dan selalu sedia mendengar keluh maupun kesah saya selama menyusun skripsi.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai kesempurnaan. Namun penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, semua itu dikarenakan keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis akan menerima dengan hati terbuka atas segala kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini memiliki guna dan manfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan.

11 Februari 2018

Penyusun

Nurhayati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL …….……..... i

HALAMAN PENGESAHAN …….……... ii

MOTTO…… iii

HALAMAN PERSEMBAHAN ……. vi

KATA PENGANTAR …… v

DAFTAR ISI …….……. vii

DAFTAR TABEL …….. xii

DAFTAR DIAGRAM ……... xiii

DAFTAR GAMBAR …… xiv

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ……..……..……..…… 1

B. Rumusan Masalah ……..……..……. 10

C. Tujuan Penelitian ……..……..……..……... 10

D. Manfaat Penelitian …….……...……..…….. 10

E. Kerangka Teori ……..……..……. 11

1. Peran ….……... 11

2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat Desa…….……... 14

3. Badan Usaha Milik Desa ……..…….. 25

F. Metode Penelitian …….……..……... 31

1. Jenis penelitian 31

2. Ruang Lingkup Penelitian 33

a. Obyek Penelitian…….……. 33

b. Definisi konseptual …….…… 33

c. Definisi Operasional …….……. 35

3. Lokasi Penelitian ……..……. 36

4. Subyek Penelitian ……..…… 36

5. Teknik Pengumpulan Data ……...…… 38

6. Teknik Analisis Data ……..…….. 41

7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data ……. 44

BAB II DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Ponggok ……... 46

1. Kondisi Geografis…….. 46

2. Kondisi Demografi……. 52

3. Tata Guna Lahan ……..... 57

4. Kondisi Ekonomi ……. 59

5. Kondisi Sosial budaya ……. 63

6. Kondisi Sarana Prasarana ……. 64

7. Lembaga Kemasyarakatan Desa …… 68

8. Lembaga Pemerintahan Desa ……. 69

B. Gambaran Singkat Terkait Program BUMDes Tirta Mandiri ……. 72

1. Sejarah Pembangunan ……... 72

2. Dasar Hukum …….. 76

3. Jenis Usaha …… 76

4. Manajemen Keuangan …… 89

5. Investasi …….. 90

6. Sumber Daya Manusia ……. 91

7. Konsultan …… 92

BAB III ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. DESKRIPSI INFORMAN…….. 94

1. Deskripsi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin…… 94

2. Deskripsi Informan Berdasarkan Usia …… 95

3. Deskripsi Informan Berdasarkan Pendidikan …… 96

4. Deskripsi Informan Berdasarkan Pekerjaan atau Jabatan …… 98

5. Deskripsi Informan Berdasarkan Agama yang Dianut …….. 99

B. ANALISIS PERAN BADAN USAHA MILIK DESA TIRTA MANDIRI DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA……. 100

1. Peran BUMDes sebagai fasilitator dalam konteks pemberdayaan masyarakat desa 101

a. BUMDes sebagai nara sumber..... 102

b. BUMDes sebagai pelatih..... 103

c. BUMDes sebagai mediator..... 108

d. BUMDes sebagai Penggerak (motivator)..... 111

2. Peran BUMDes sebagai Koordinator dalam konteks pemberdayaan masyarakat Desa..... 118

3. Peran BUMDes sebagai Dinamisator dalam dalam konteks pemberdayaan

Masyarakat desa..... 121

4. Kendala-kendala yang dihadapi BUMDes dalam menjalankan perannya 124

5. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala 128

6. Faktor pendukung BUMDes dalam menjalankan perannya 132

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 136

B. Saran 141

DAFTAR PUSTAKA …….……. 145

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Tata Guna Lahan 56

Tabel II.2 Peruntukkan Lahan di Desa Ponggok..... 57

Tabel II.3 Daftar Mata Pencaharian Masyarakat Desa Ponggok..... 59

Tabel II.4 Kondisi Bangunan dan Sarana Prasarana..... 64

Tabel II.5 Daftar Sarana Pendidikan..... 65

Tabel II.6 Daftar Sarana Kesenian..... 67

Tabel II.7 Lembaga Kemasyarakatan Desa..... 68

Tabel II.8 Daftar Perangkat Desa Ponggok Sesuai Pendidikan..... 69

Tabel II.9 Daftar Dukuh di Desa Ponggok..... 71

Tabel II.10 Tabel Manajemen BUMDes Tirta Mandiri 91

Tabel II.11 Daftar Konsultan Yang Berkerja di BUMDes Tirta Mandiri..... 92

Tabel III.1 Deskripsi Informan Berdasarkan Perkerjaan..... 98

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan. Salah satu misi pemerintah adalah membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan. Tujuannya, adalah untuk memberi peluang bagi kemampuan daerah dan pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi regional dan nasional.

Kemajuan ekonomi nasional hanya akan tercapai jika terdapat iklim perekonomian yang baik di tingkat provinsi. Kemajuan ekonomi di tingkat provinsi akan tercapai jika kabupaten memiliki kegiatan ekonomi yang baik. Kemajuan ekonomi sebuah Kabupaten dapat tercapai karena adanya sumbangsih dari ekonomi pedesaan yang kuat yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat luas. Hal ini akan menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk diterapkan di semua tingkat pembangunan dan keputusan berdasarkan kebutuhan nyata dari masyarakat. Pembangunan pedesaan merupakan salah satu cara dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Sejak 1993 pemerintah telah membuat program IDT instruksi presiden guna mengentaskan kemiskinan di pedesaan tertinggal pada masa Pemerintahan Orde Baru. Program ini merupakan manivestasi dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993

tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan. Program IDT dilaksanakan dengan memberikan bantuan modal usaha berupa dana bergulir kepada lebih 20 ribu desa tertinggal dengan dana sebesar Rp. 20 juta setiap tahun. Bantuan dana bergulir ini diberikan selama 3 tahun anggaran. Selanjutnya diikuti program P3DT (Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal) di tahun 1995 untuk mendukung dan meningkatkan implementasi IDT. Program P3DT mempunyai tujuan utama membangun sarana di pedesaan tertinggal. Dalam rangka mendukung pengembangan kegiatan ekonomi di desa tertinggal tersebut selain bantuan modal dan bantuan teknis, pemerintah dengan pihak donor yang berasal dari Jepang dan Bank Dunia telah melakukan kerjasama untuk meningkatkan program penanggulangan kemiskinanan dengan membangun prasarana yang menyediakan akses dan prasarana penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan di desa tertinggal.

Kemudian pada tahun 1998 pemerintah meluncurkan program PPK(sekarang PNPM Mandiri). Program ini memfokuskan pada penyediaan dana berputar (revolving block grants) dengan menggunakan lembaga keuangan yang dimiliki masyarakat. Paralel dengan konsep pembangunan pedesaan dan program pengentasan kemiskinan, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah,Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah telah membuat reformasi organisasi untuk menitik beratkan ketersediaan panduan pembangunan,supervisi dan pelatihan. Tugas tersebut merupakan implementasi empat fungsi birokrasi yaitu pelayanan, pemberdayaan, pembangunan dan jaringan usaha.

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan

inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Berdasarkan asumsi itulah maka sudah seharusnya eksistensi desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian perekonomian desa.

BUMDes diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Hal ini dijelaskan secara eksplisit dalam pasal 213 ayat 1, tentang Pemerintahan Desa, disebutkan bahwa "Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa". Disebutkan juga bahwa tujuan utama berdirinya badan usaha tersebut adalah untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kemudian keseriusan pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDes dibuktikan dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan Permendagri No.39 Tahun 2010 tentang BUMDes. Berbagai kebijakan tersebut menandakan keseriusan pemerintah dalam mengembangkan BUMDes. Kepemilikan lembaga BUMDes ini dikontrol bersama di mana tujuan utamanya untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat.

Peningkatan keberadaan BUMDes memang sangat signifikan. Jika pada 2014 BUMDes di Indonesia hanya 1.022 unit, awal 2017 jumlahnya telah 18.446 unit. Jumlah ini pun diyakini akan terus meningkat. *(Sumber:**KOMPAS.com)***

BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepan BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh BUMDes pula, diharapkan mampu menjadi sentra pemberdayaan masyarakat yang ada dipedesaan dengan jenis pelayanan yang ada.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan Lembaga Keuangan Desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya.

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah (grass root), yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain,

pemberdayaan (empowering) adalah memampukan dan memandirikan masyarakat miskin. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, kebertanggung jawaban, adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan lembaga-lembaga sosial dan pengintegrasiannya ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya.

Pemberdayaan masyarakat merupakan tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya. Masyarakat miskin seringkali merupakan kelompok yang tidak berdaya baik karena hambatan internal dari dalam dirinya maupun tekanan eksternal dari lingkungannya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu pilar kebijakan penanggulangan kemiskinan terpenting. Kebijakan pemberdayaan masyarakat dianggap resep mujarab karena hasilnya dapat berlangsung lama. Isu-isu kemiskinan pun senantiasa cocok diselesaikan akar masalahnya melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat.

Untuk mencapai pemberdayaan masyarakat dalam suatu pembangunan sosial, maka dibutuhkan suatu perencanaan yang matang. Perencanaan merupakan suatu hal yang sangat mendasar dalam pelaksanaan pembangunan, sebab dengan perencanaan yang tepat maka tujuan pembangunan dapat tercapai.

Setelah melihat beberapa poin pokok seperti yang dikemukakan diatas, dengan adanya BUMDes diharapkan akan terjadi pemberdayaan dalam suatu tatanan masyarakat pedesaan,

maka dalam hal ini BUMDes memiliki peranan penting bagi kehidupan masyarakat desa. Salah satu program yang ada dalam upaya pengentasan kemiskinan dan sebagai suatu tujuan pemberdayaan tertuang dalam BUMDes, yakni BUMDes Tirta Mandiri.

BUMDes Tirta Mandiri adalah badan usaha milik Desa yang terletak di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. BUMDes ini bergerak dalam bidang usaha kepariwisataan yakni pemandian Umbul Ponggok sendiri dan beberapa wisata lain.

Sesuai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Bab VII bagian kelima yang menyatakan Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pendirian BUMDes, kemudian berdasarkan PP 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2006 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Berdasarkan undang-undang dan peraturan di atas, maka muncul gagasan dari Kepala Desa Ponggok melalui mekanisme musyawarah sebagai wujud melembagakan demokrasi lokal dengan mempertemukan BPD, Pemerintah Desa dan Kelompok warga untuk membahas isu-isu strategis salah satunya soal pendirian BUMDes. Mendirikan BUMDes pada dasarnya membangun tradisi berdemokrasi di desa untuk mencapai derajat ekonomi masyarakat desa yang lebih tinggi. Dengan berbekal daftar inventarisasi potensi dan peta aset desa, forum musyawarah Desa Ponggok melakukan praktik Deliberative Democracy untuk menyepakati gagasan pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset desa melalui BUMDes. Dengan pertimbangan yang matang Pemerintah Desa Ponggok mendirikan BUMDes pada tanggal 15 Desember 2009

berdasarkan keputusan yang dituangkan dalam Peraturan Desa No 06 Tahun 2009 dengan nama BUMDes Tirta Mandiri.

Kepala Desa Ponggok yang dijabat oleh Bapak Junaedi Mulyono, SH merupakan sosok yang visioner, melihat masa depan. Beliau selalu menyampaikan gagasan dengan prinsip Believing is Seeing (kalau kita percaya pasti kita akan melihat) itu yang menjadi kekuatan luar biasa untuk tidak pernah menyerah dalam mewujudkan cita-cita, karena menyadari bahwa untuk meyakinkan masyarakat tidaklah mudah, kebanyakan masyarakat berfikiran *Seeing is Believing* (kalau melihat baru percaya), maka perlu bukti untuk menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat. Pada masa pemerintahan periode pertama sudah melakukan terobosan-terobosan program yang membawa perubahan yang mendasar di masyarakat. Mulai dari pembangunan infrastruktur, jalan poros desa, jalan kampung, jalan usaha tani dan jalan yang menghubungkan obyek wisata Desa Ponggok, jembatan, saluran irigasi pertanian, fasilitas sosial pendidikan, fasilitas sosial kesehatan dan fasilitas ekonomi dengan membangun kios kuliner bagi masyarakat serta membangun Kantor Desa yang megah sebagai kebanggaan dan jati diri Desa Ponggok.

Pemerintah Desa Ponggok juga mengembangkan kegiatan sosial, memberikan santunan, pelatihan ketrampilan dan pelatihan motivasional serta pengajian rutin tingkat desa. Dalam bidang ekonomi berupaya menumbuhkan semangat wirausaha bagi masyarakat melalui bantuan modal, pelatihan kewirausahaan dan pendirian Lembaga Ekonomi Desa yaitu BUMDes. Pada periode kedua sektor ekonomi menjadi prioritas utama pembangunan, dengan pemperkuat BUMDes sebagai kekuatan ekonomi lokal untuk mewujudkan kejahteraan masyarakat dan peningkatan sumber pendapatan asli desa. BUMDes mendapatkan dukungan yang besar dari desa dengan dilakukanya revitalisasi Obyek Wisata Umbul Ponggok yang saat ini menjadi sumber pendapatan terbesar BUMDes. Mulai Tahun 2015 sampai Tahun 2019 Ponggok akan

mengembangkan semua Obyek Wisata yang dimiliki sehingga potensi dan asset desa bisa dimanfaatkan secara optimal untuk memperoleh pendapatan bagi masyarakat maupun PADes dalam melangsungkan pembangunan secara berkelanjutan. Dengan mengelola satu Obyek Wisata saja yaitu Umbul Ponggok terbukti pada Tahun 2014 PADes yang diterima dari hasil usaha BUMDes sudah sebesar Rp. 350.000.000,- apalagi kalau Ponggok sudah mengelola lima Obyek Wisata, pastinya pendapatan yang diterima akan berlipat. Keberadaan BUMDes sekarang sudah sangat besar manfaatnya bagi masyarakat karena mampu mengurangi angka pengangguran di Desa Ponggok melalui penyerapan tenaga kerja lokal sebagai karyawan BUMDes yang berjumlah 25 Orang.

Pertumbuhan kinerja yang baik ini membuat Desa Ponggok pun diganjar Award sebagai Desa Wisata kategori Pemberdayaan Masyarakat dari Kementerian Desa PDTT. Sedangkan BUMDes Tirta Mandiri Ponggok mendapatkan Award sebagai BUMDes pemenang kategori Desa Wisata Pemberdayaan Masyarakat. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo menilai, desa seperti Ponggok berhasil mengelola potensi pariwisata untuk memajukan ekonomi.

“Penghargaan ini menunjukkan bahwa desa mampu berkembang dan berprestasi. Melalui penghargaan Desa Wisata terbaik, diharapkan akan menjadi motivasi bagi desa lainnya bahwa desa mampu berprestasi sehingga pemerataan pembangunan di Indonesia dapat terwujud,” ujarnya dalam acara Malam Penganugerahan Desa Wisata Award 2017 yang berlangsung di Expo BUMDes Nusantara 2017, Bukit tinggi, beberapa waktu lalu.

Untuk itu dalam penelitian kali ini, peneliti berkeinginan untuk mengangkat judul penelitian “Peran Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana peran BUMDes Tirta Mandiri dalam pemberdayaan masyarakat desa Umbul Ponggok ?

2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat peran BUMDes Tirta Mandiri dalam pemberdayaan masyarakat Desa Ponggok?

C. TUJUAN PENELITIAN

1.Untuk mengetahui peran BUMDes Tirta Mandiri dalam pemberdayaan masyarakat desa Umbul Ponggok

2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat peran BUMDes Tirta Mandiri dalam pemberdayaan masyarakat Desa Ponggok.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara akademik yaitu untuk memperoleh gelar Strata 1 Ilmu Sosiatri dari STPMD “APMD” Yogyakarta, selain itu juga memperkaya khazana ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang implementasi program dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis yaitu untuk menjadi masukkan bagi lembaga pemerintahan serta masyarakat yang menjalankan Badan Usaha Milik Desa, sehingga dapat terus berkembang sesuai dengan hasil penelitian-penelitian yang didapat.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Isbandi Rukminto. 1991. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat.* PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Bungin, Burhan (ed). 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif – Aktualisasi metodologis kearah varian kontemporer*.. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta

Craig, RL. (1987). *Trainning and Development Handbook, a Guide to Human Resourrce Development ; American Society for Training and Development (ASTD).* Mc Graw Hill Book Company. New York.

Conyers, Diana. 1984. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). 2007. *Buku Panduan Pendirian danPengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).* Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Surabaya.

Handayaningrat, Soewarno. 1985. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Managemen.* PT Gunung Agung. Jakarta.

Koentjaraningrat. 1990. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan.* PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Maelong, Lexi. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas EkonomiUniversitas Brawijaya. 2007, *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).* PP-RPDN. Jakarta.

Sarwono, S.W. (2002). *Psikologi Sosial: Individu dan Teori-teori Psikologi Sosial.* Balai Pustaka. Jakarta.

Singarimbun, Masri dan Soffian Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survey*. LP3S.s .Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Soleman B. Taneko. 1981. *Hukum Adat Indonesia* CV Rajawali. Jakarta.

Soetrisno,Lukman. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif.* Kanisius. Yogyakarta.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, CV. Bandung. Bandung

Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat.* PT Refika Aditama. Bandung.

Sumber Lain

Agung, Budi Santoso. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Aset (Studi Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri Di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah). Tesis. Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies UNY, 2017.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Menteri Desa PDTT No. 1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

http://digilib.unila.ac.id/928/9/BAB%20II.pdf

http://bpmpd.ntbprov.go.id/wp-content/uploads/2016/06/BUKU-5_PENGEMBANGAN-DESA-rev.pdf

http://bumdestirtamandiri.co.id/profil-bumdes/

http://eprints.uny.ac.id/18096/4/PDF%20BAB%202%2009.10.040%20Rif%20p.pdf

http://makalahgood.blogspot.co.id/2013/10/fasilitator.html

http://eprints.undip.ac.id/59183/3/BAB_II_WAHYU_DANARESA.pdf